

**LAPORAN *BASE-LINE SURVEY* PENDAPAT PARA TOKOH
(OPINION LEADER) TENTANG *OPEN PARLIAMENT* DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN
I. PENDAHULUAN	3
II. ASPEK PENGETAHUAN	8
III. ASPEK PENILAIAN	31
IV. REKOMENDASI PUBLIK	38
V. PENUTUP	52

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- Baseline Survey Keterbukaan Parlemen ini dibuat dalam rangka mendukung implementasi Open Parlemen Indonesia (OPI), sebagai inisiatif global untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi parlemen melalui kerja bersama antara DPR dan masyarakat sipil.
- Di Indonesia, Open Parliament dideklarasikan oleh DPR RI pada 29 Agustus 2018 dengan lima komitmen yang tertuang dalam National Action Plan (NAP) 2018 – 2020. Komitmen tersebut antara lain peningkatan manajemen data dan layanan Informasi legislasi, promosi pemanfaatan teknologi informasi, promosi transparansi informasi publik di parlemen.
- Baseline Survey Keterbukaan Parlemen dilaksanakan dalam rangka menghimpun beragam perspektif publik ini untuk memberikan masukan bagi pengembangan National Action Plan

TUJUAN DAN KELUARAN

- **Tujuan:**

Menghimpun perspektif publik terkait pengetahuan, penilaian, dan rekomendasi publik mengenai pelaksanaan keterbukaan parlemen untuk memberikan masukan bagi pengembangan Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia.

- **Keluaran**

Base line perspektif publik terkait pengetahuan, penilaian, dan rekomendasi publik mengenai pelaksanaan keterbukaan parlemen untuk memberikan masukan bagi pengembangan Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia.

METODOLOGI

- Sampel dan Responden

Sampel dalam survei ini ditentukan dengan metode *quota purposive sampling*, yaitu jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam jumlah dan kriteria responden tertentu yang dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan open parliament yang dibutuhkan dalam survei ini.

- Jumlah sampel dalam survei ini adalah 100 responden tokoh mewakili kriteria: NGO/CSO, Ormas, Akademisi, Peneliti, Jurnalis/Media, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah, Politisi, Anggota Parlemen (DPR/DPRD)

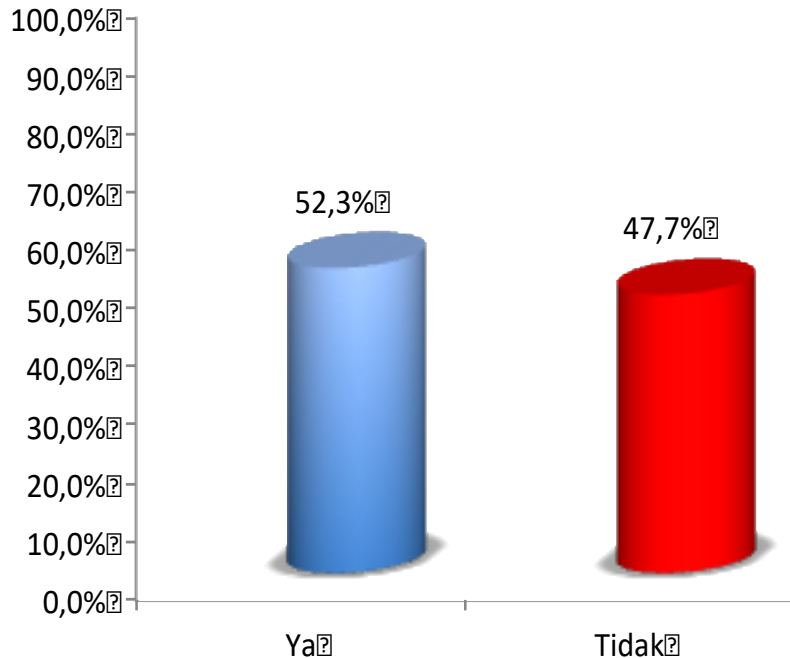
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- *Base-line survey* ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu 20 Agustus – 20 September 2019 di dua wilayah, yaitu DKI Jakarta dan Kota Bandung.
- Pemilihan DKI Jakarta dan Kota Bandung sebagai lokasi survei adalah karena pertimbangan teoritik yang mewakili wilayah pusat (*core*) dan pinggiran (*semi-pheri*)

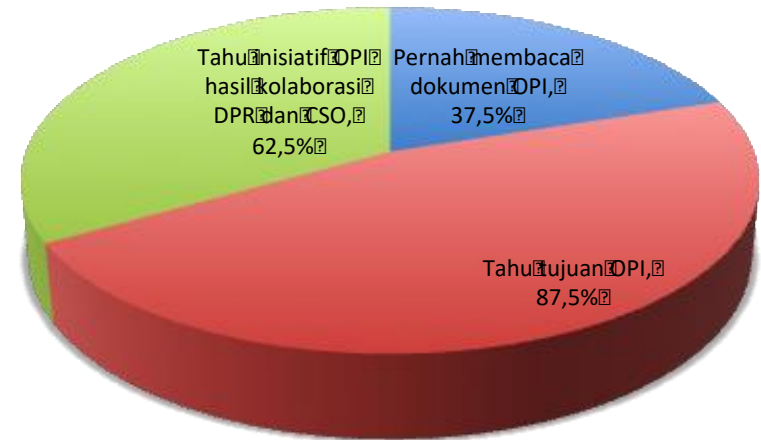
ASPEK PENGETAHUAN

INFORMASI DEKLARASI OPEN PARLIAMENT INDONESIA

Apakah Anda tahu/ pernah mendengar bahwa DPR RI telah mendeklarasikan inisiatif *Open Parliament* (Keterbukaan Parlemen)? n=100



- JIKA YA, Apakah Anda pernah membaca dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) open parliament yang telah dideklarasikan oleh DPR RI?.....
- Apakah Anda tahu bahwa inisiatif Open Parliament Indonesia bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi/kolaborasi, dan inovasi di DPR RI?
- Apakah Anda tahu bahwa deklarasi inisiatif *Open Parliament* (Keterbukaan Parlemen) merupakan hasil kolaborasi antara DPR dan NGO/CSO?

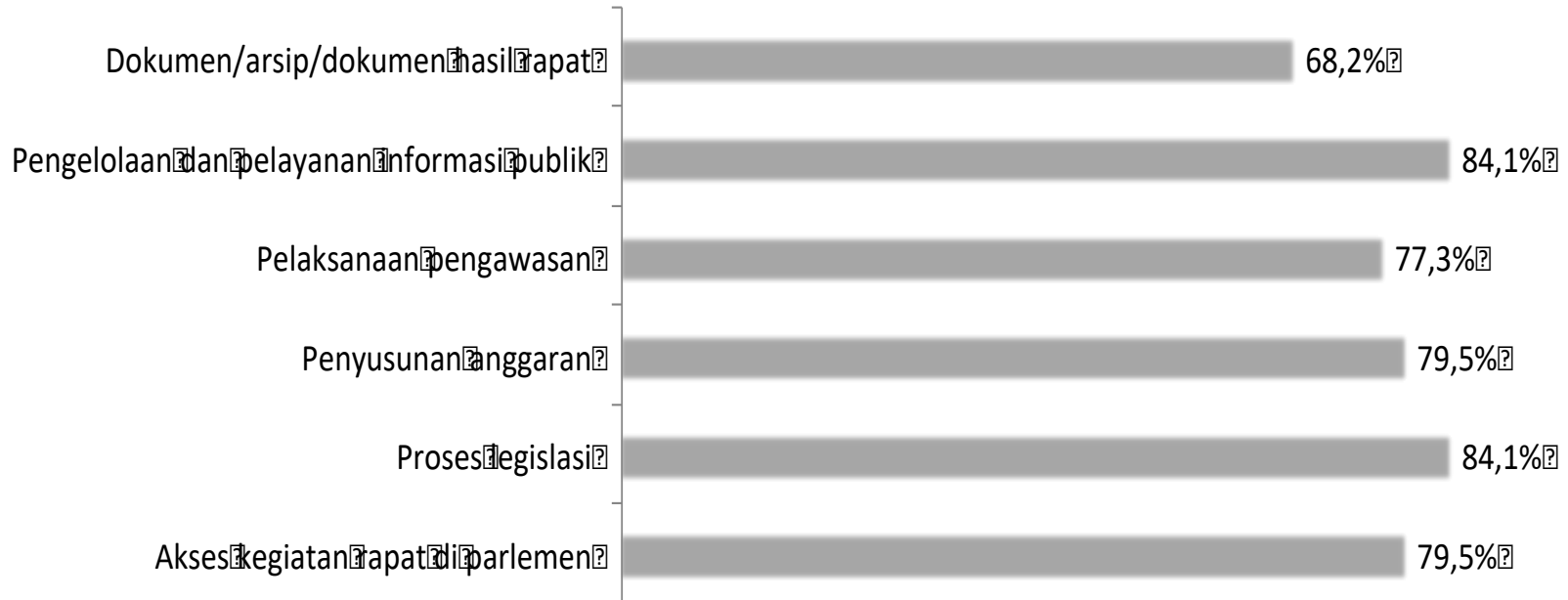


ANALISA

- Informasi mengenai deklarasi inisiatif Open Parliament oleh DPR RI ternyata masih belum merata tersosialisasi dikalangan publik terlihat dari temuan survei bahwa masih ada 47.7 persen responden yang belum mengetahui deklarasi inisiatif open parliament oleh DPR RI.
- Dari responden yang mengetahui deklarasi inisiatif Open Parliament, tidak semua tahu/pernah membaca dokumen Open Parliament; mengetahui bahwa mengetahui tujuan Open Parliament adalah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, memperkuat partisipasi/kolaborasi dan inovasi di DPR; dan mengegatuhi deklarasi Open Parliament merupakan hasil kolaborasi antara DPR dan CSO

KETERBUKAAN PARLEMEN SEBAGAI KEWAJIBAN UNDANG-UNDANG

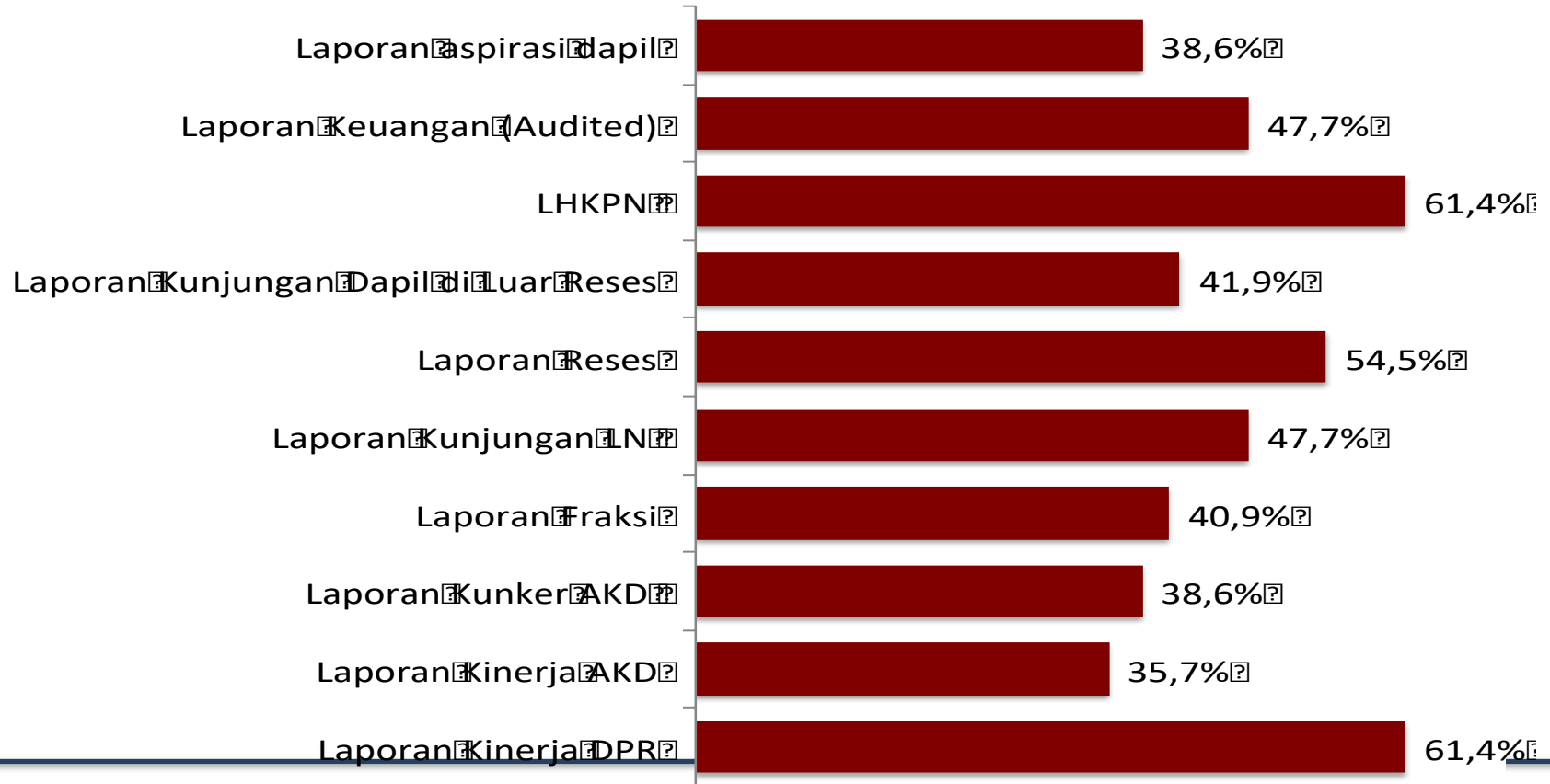
Apakah Anda tahu bahwa undang-undang mengharuskan DPR RI terbuka dalam hal:



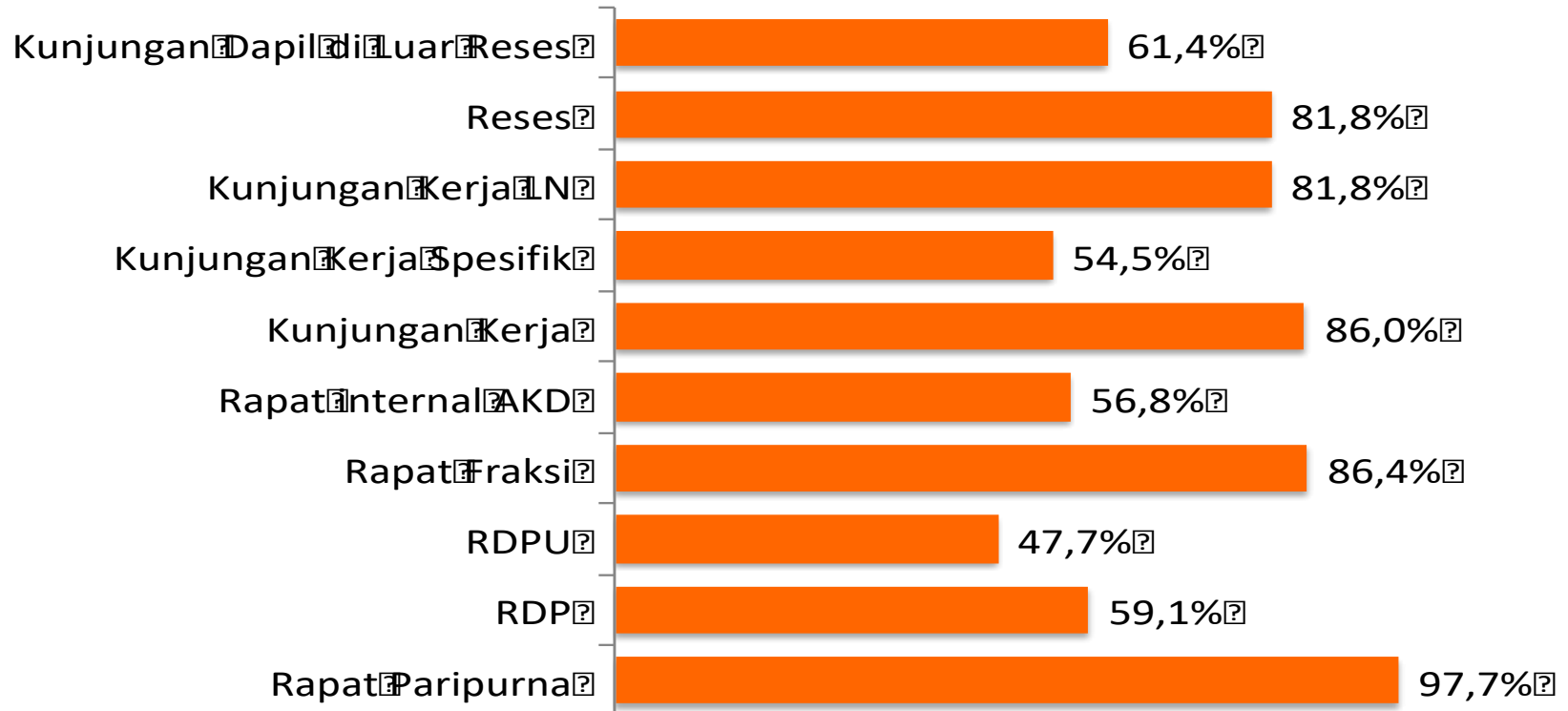
ANALISA

- Meskipun informasi mengenai deklarasi OPI belum banyak diketahui oleh publik, namun sebagian besar publik telah mengetahui bahwa DPR memiliki kewajiban undang-undang untuk terbuka dalam hal: (i) akses kegiatan rapat, (ii) proses legislasi, (iii) penyusunan anggaran, (iv) pelaksanaan pengawasan, (v) pengelolaan dan pelayanan informasi publik, (vi) dokumen/arsip/dokumen hasil rapat.

PENGETAHUN TENTANG JENIS LAPORAN DPR



PENGETAHUN TENTANG JENIS KEGIATAN DPR

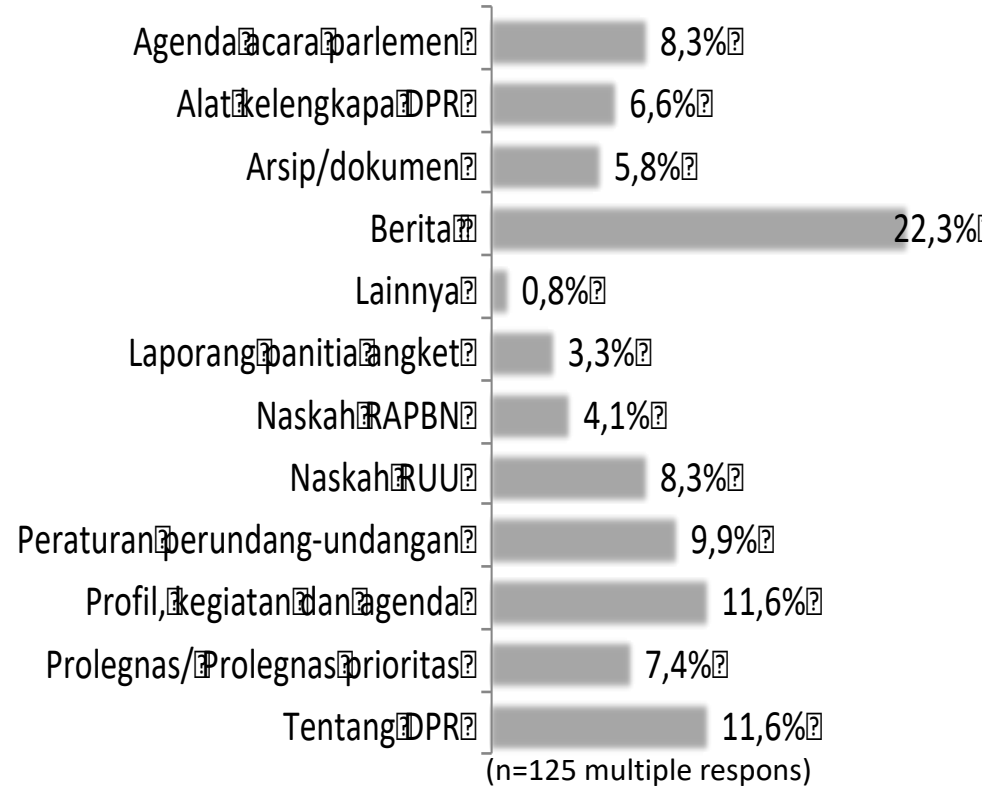
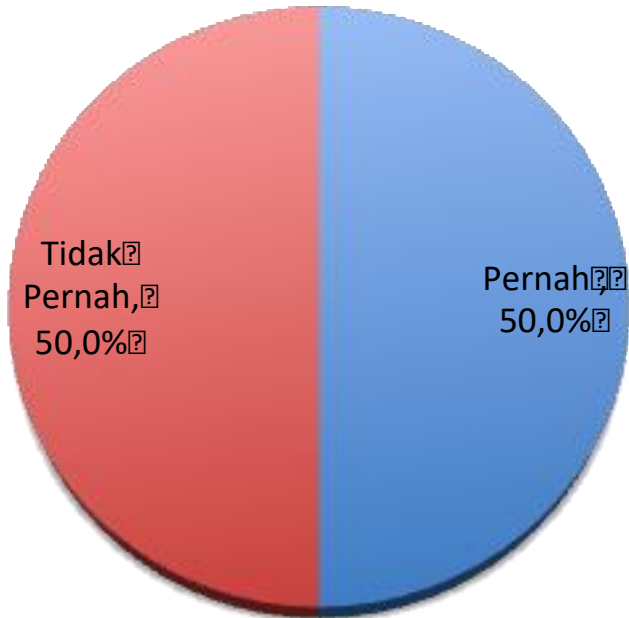


ANALISA

- Laporan kinerja DPR, LHKPN dan Laporan Reses merupakan tiga jenis laporan laporan DPR RI yang cukup diketahui oleh publik dengan baik (tingkat pengetahuan publik di atas 50 persen)
- Sementara terkait dengan pengetahuan kegiatan DPR RI, publik relatif lebih pengetahuannya (diatas 50 persen) mengenai kegiatan DPR RI terkait dengan: (i) rapat paripurna, (ii) rapat fraksi, (iii) kunjungan kerja, (iv) reses, (v) kunjungan luar negeri, (vi) kunjungan dapil di luar reses, (vii) RDP, (viii) kunjungan kerja spesifik dan (ix) rapat internal AKD

AKSES INFORMASI WEBSITE DPR RI

Apakah Anda pernah mengakses website DPR RI? (n=100)

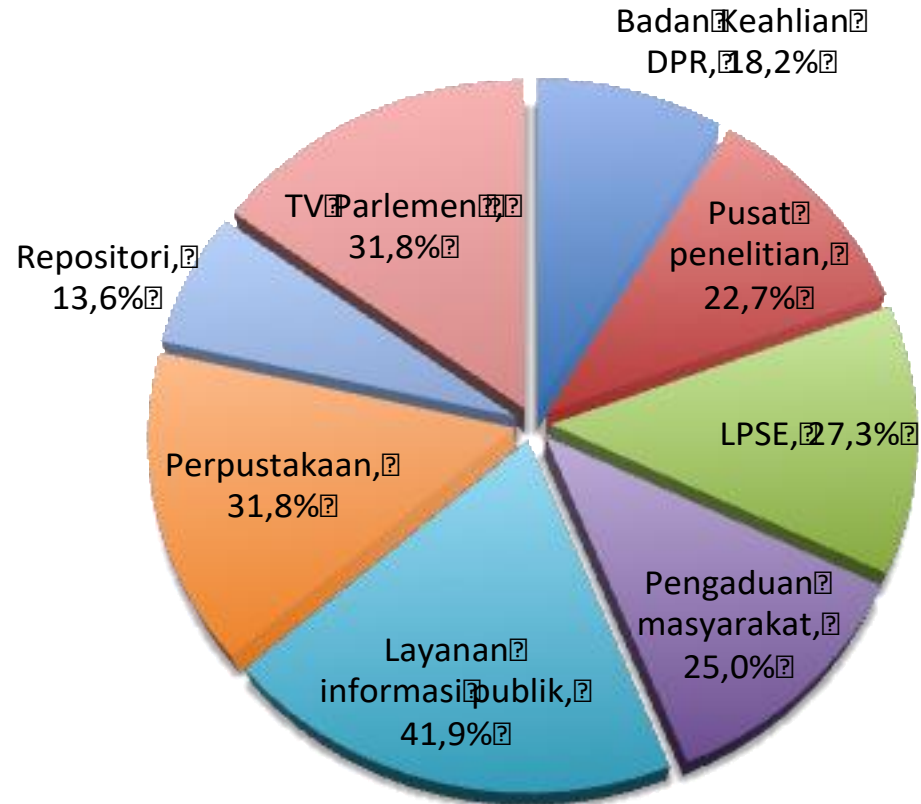


ANALISA

- 50 persen responden menyatakan pernah mengakses website DPR RI. Hal ini mengindikasikan bahwa publik belum sepenuhnya memanfaatkan website DPR RI untuk mendapatkan informasi mengenai DPR RI.
- Berita, informasi mengenai DPR dan profil, kegiatan dan agenda merupakan tiga kategori informasi yang paling banyak diakses oleh publik.

PENGETAHUAN/AKSES TERHADAP APLIKASI/SUBDOMAIN

Apakah Anda mengetahui/pernah mengakses aplikasi/subdomain berikut pada situs web DPR?:
Ya/Tidak (n=100)



KEMUDAHAN, KETERSEDIAAN INFORMASI DAN TAMPILAN WEBSITE

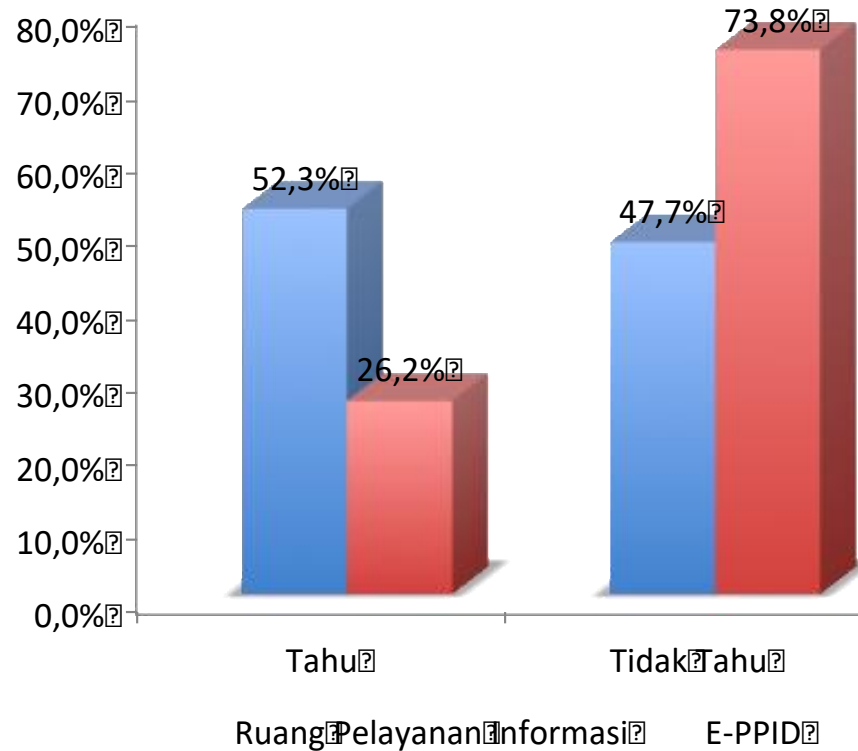
	Positif	Negatif
Mudah untuk menemukan informasi yang dicari pada situs web DPR	47,6%	52,4%
Informasi yang dicari tersedia di situs web DPR	47,7%	52,3%
Tampilan situs web DPR menarik bagi pengguna	31,8%	68,2%

ANALISA

- Grafik diatas memberikan gambaran rendahnya pengetahuan/tingkat akses publik, kurang dari 50 persen, terhadap aplikasi/sub domain yang terdapat di website DPR RI untuk mendapatkan informasi mengenai DPR RI
- Di lain sisi, publik menilai bahwa tingkat kemudahan akses, ketersediaan informasi yang dibutuhkan publik dan tampilan website masih menjadi persoalan yang menghambat akses publik untuk mendapatkan informasi melalui website.

SARANA AKSES INFORMASI

Apakah Anda tahu bahwa DPR menyediakan sarana akses informasi berikut?
(n=100)

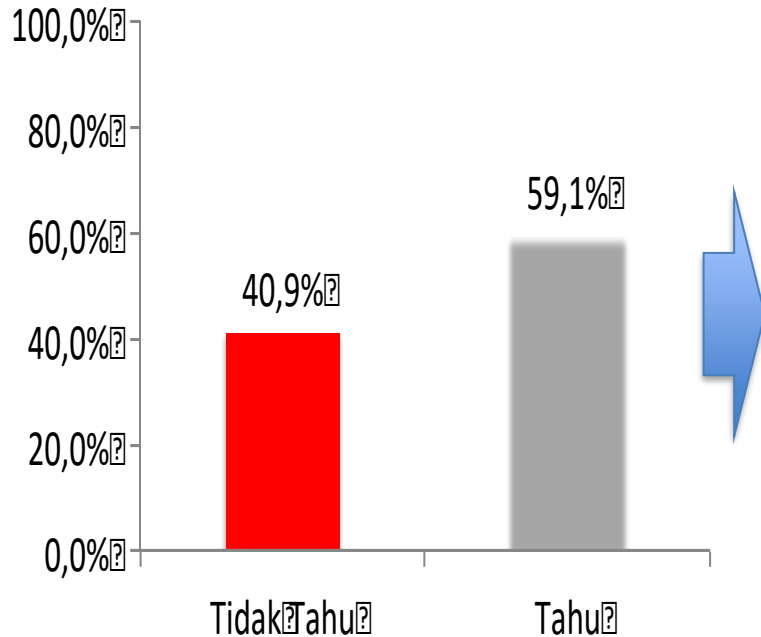


ANALISA

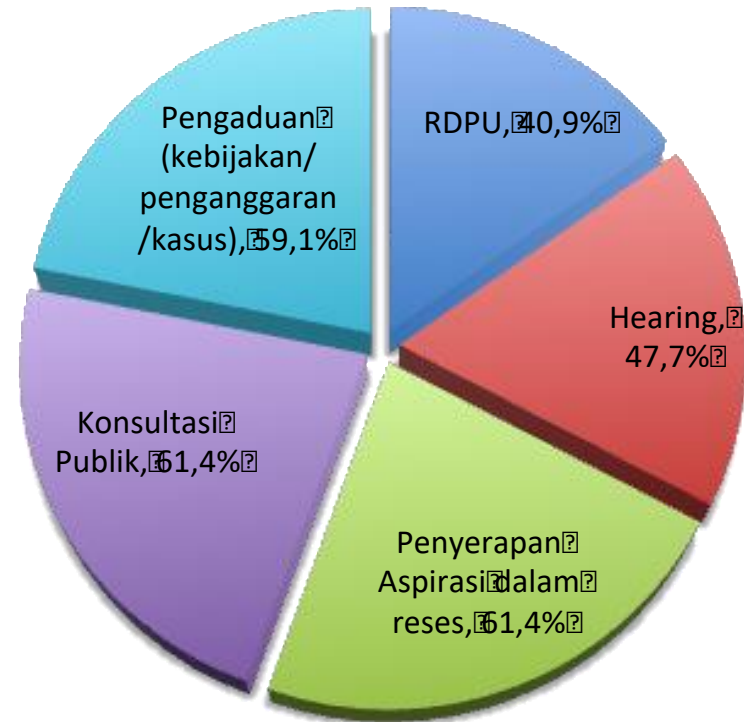
- Selain website, DPR RI juga telah menyediakan sarana akses informasi melalui ruang pelayanan informasi dan PPID. Dalam konteks ini tingkat pengetahuan publik terhadap dua jenis sarana akses informasi tersebut adalah rendah (20 – 50 persen)

PENGETAHUN MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK

Apakah Anda mengetahui bahwa UU memberi jaminan berpartisipasi di DPR? (n=100)



Apakah Anda mengetahui mekanisme partisipasi berikut: tahu/tidak tahu (n=100)

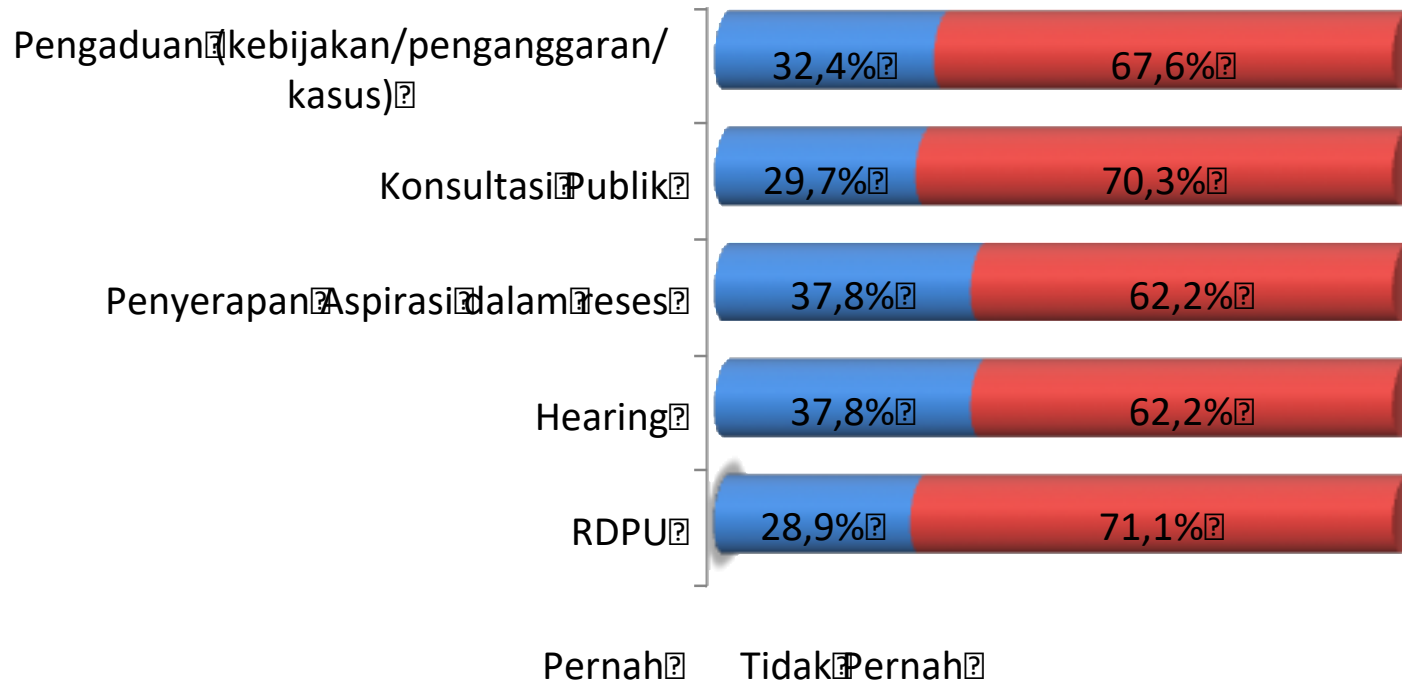


ANALISA

- Undang-undang telah menjamin partisipasi publik di DPR RI, hasil survei memperlihatkan masih banyak publik yang belum mengetahui jaminan Undang-undang atas partisipasi publik di DPR RI (40 persen).
- Penyerapan aspirasi, konsultasi publik dan pengaduan merupakan tiga mekanisme partisipasi yang banyak ketahui oleh publik dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI (60 persen).

KETERLIBATAN DALAM MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPR

JIKA TAHU, Apakah Anda pernah/tidak pernah mengikuti kegiatan dibawah ini: (n=50 s.d 60 responden)

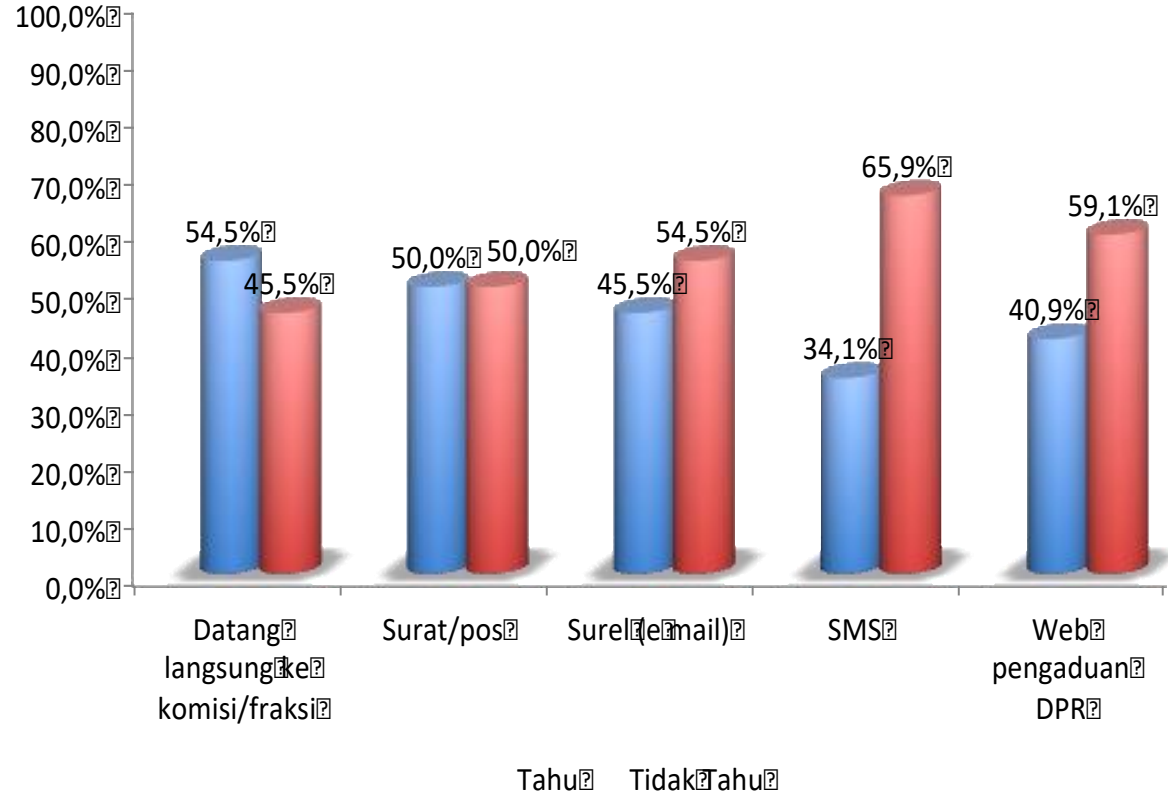


ANALISA

- Grafik di atas memperlihatkan rendahnya tingkat keterlibatan publik yang mengetahui mekanisme partisipasi di DPR RI dalam mekanisme partisipasi yang tersedia. (Di bawah 40 persen)

MEKANISME PENGADUAN DI DPR RI

Apabila Anda Tahu mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang disediakan oleh DPR ? (n=100)



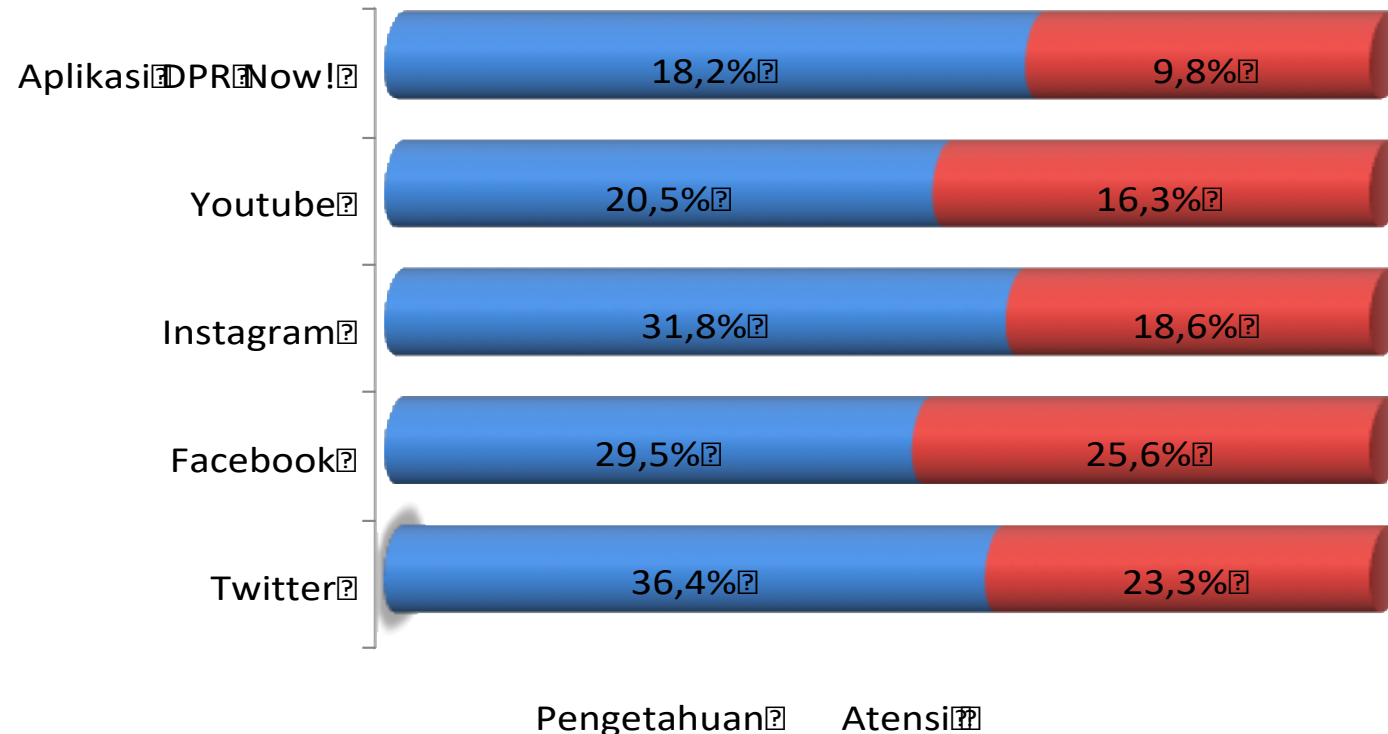
ANALISA

- Grafik di atas memperlihatkan hasil survei mengenai rendahnya pengetahuan publik terhadap mekanisme pengaduan publik yang disediakan oleh DPR bagi masyarakat.

KEBERADAAN MEDIA SOSIAL/APLIKASI DPR RI DAN ATENSI PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN DPR RI MELALUI MEDIA SOSIAL/APLIKASI

Apakah Anda tahu nama akun pada media sosial/aplikasi DPR berikut ini ? (n=100)

Apakah Anda mengikuti perkembangan DPR melalui: (n= 10 -25 responden)



ANALISA

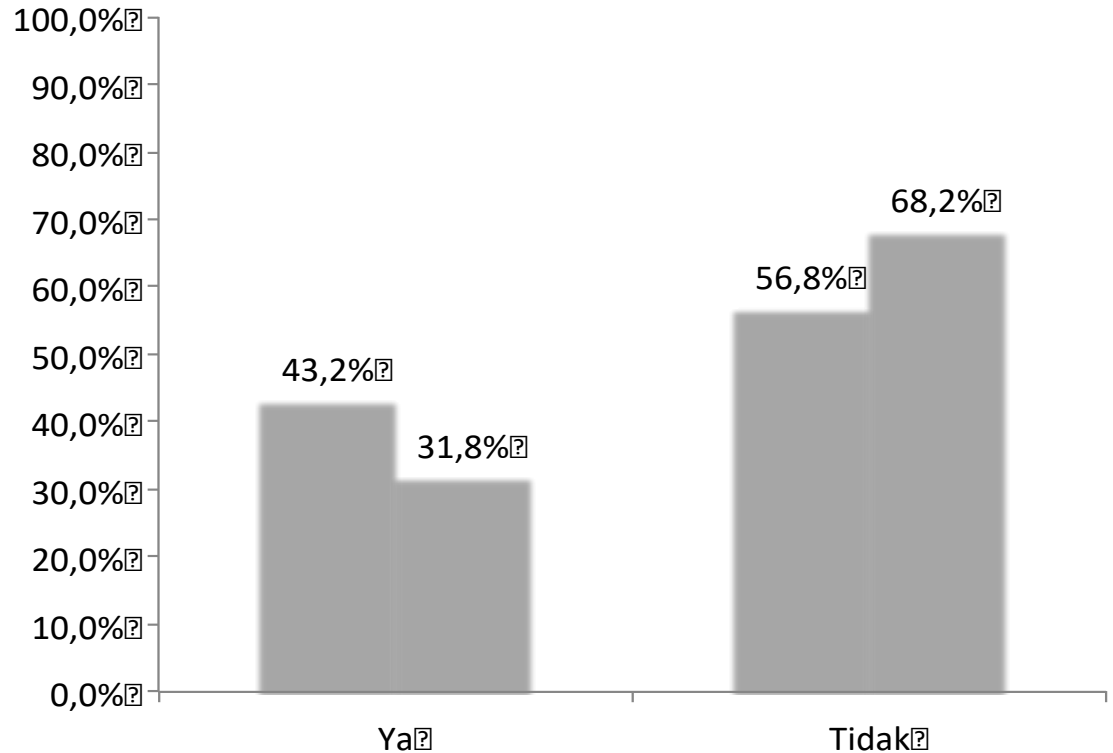
- Grafik di atas memperlihatkan hasil survei rendahnya tingkat pengetahuan publik terhadap media sosial/aplikasi yang dikembangkan oleh DPR RI untuk memberikan informasi kepada publik.
- Hal ini juga berdampak (secara langsung/tidak langsung) terhadap pemanfaatan publik atas media sosial/aplikasi tersebut untuk mengikuti perkembangan DPR RI.
- Facebook dan Twitter merupakan dua media sosial yang relatif banyak digunakan oleh publik untuk mengikuti perkembangan DPR RI.

ASPEK PENILAIAN

KEMUDAHAN PROSEDUR DAN KETERSEDIAAN INFORMASI

Apakah prosedur memperoleh pelayanan informasi di DPR mudah? (n=100)

Apakah informasi yang diberikan pelayanan informasi di DPR sesuai yang Anda minta/butuhkan? (n=100)

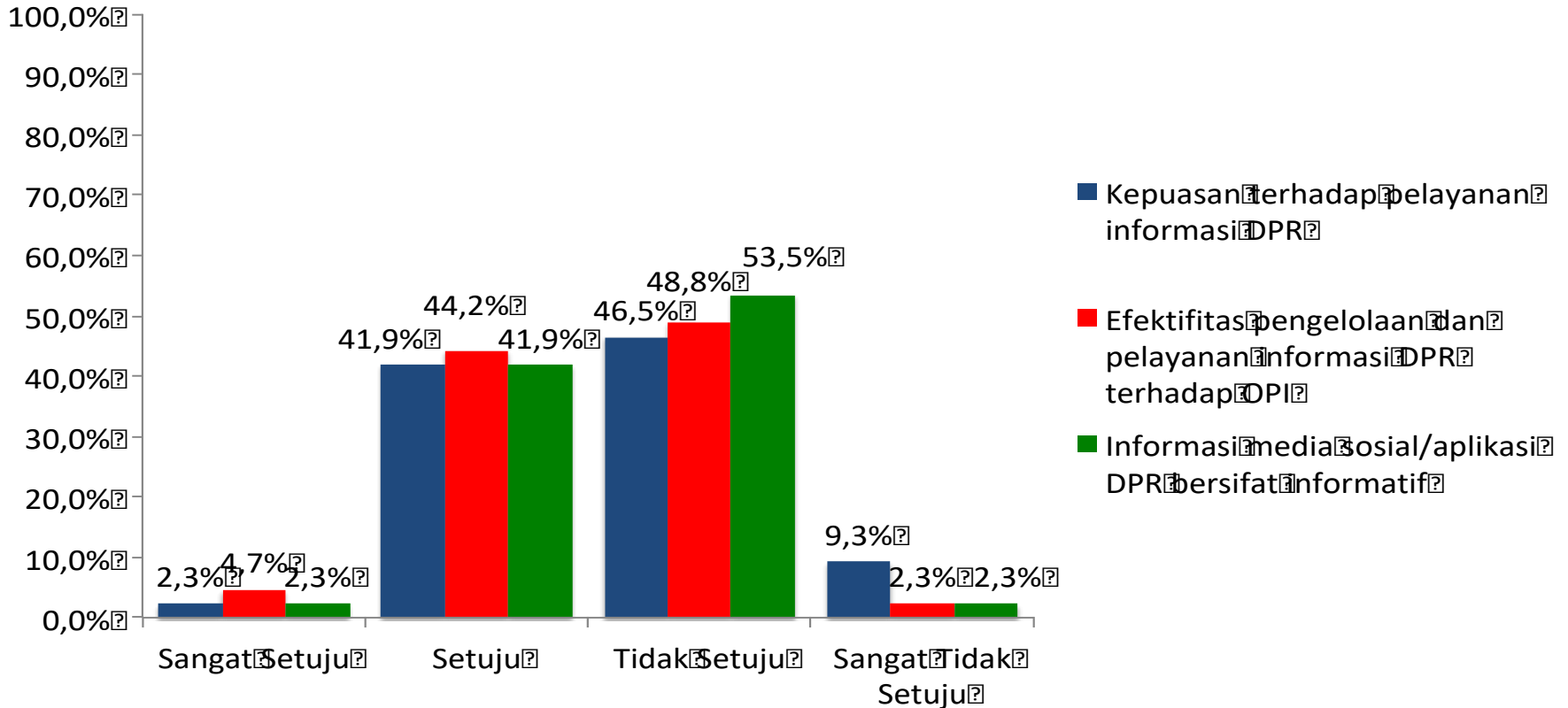


Kemudahan Prosedur Ketersediaan Informasi Sesuai Kebutuhan

ANALISA

- Hasil survei memperlihatkan bahwa kemudahan prosedur memperoleh pelayanan informasi dan ketersediaan informasi sesuai dengan kebutuhan publik masih menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian oleh DPR RI.

KEPUASAN DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL/APLIKASI DPR RI



ANALISA

- Berdasarkan grafik di atas, hasil survei memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap rendah pelayanan informasi DPR masih .
- Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan informasi publik DPR dinilai belum efektif menjadikan DPR RI sebagai parlemen yang terbuka.
- Dalam hal penyediaan informasi melalui media sosial/aplikasi yang dikembangkan oleh DPR juga dinilai belum informatif bagi publik.

SKALA PENILAIAN TENTANG KETERBUKAAN DAN EFEKTIFITAS AKSES PARTISIPASI DAN KETERBUKAAN DPR (SKALA 1-5)

	Keterbukaan informasi	Efektifitas Mekanisme partisipasi publik	Efektifitas kunker bagi partisipasi publik	Efektifitas sosialisasi bagi partisipasi publik	Efektifitas keterbukaan DPR bagi akuntabilitas Parlemen
Penyusunan dan penetapan prolegnas	2,7	2,8	2,6	2,6	2,7
Penyiapan dan pembahasan RUU	2,7	2,9	2,6	2,6	2,7
Pembahasan RUU APBN	2,7	2,9	2,6	2,6	2,7
Pengawasan pelaksanaan undang-undang	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8

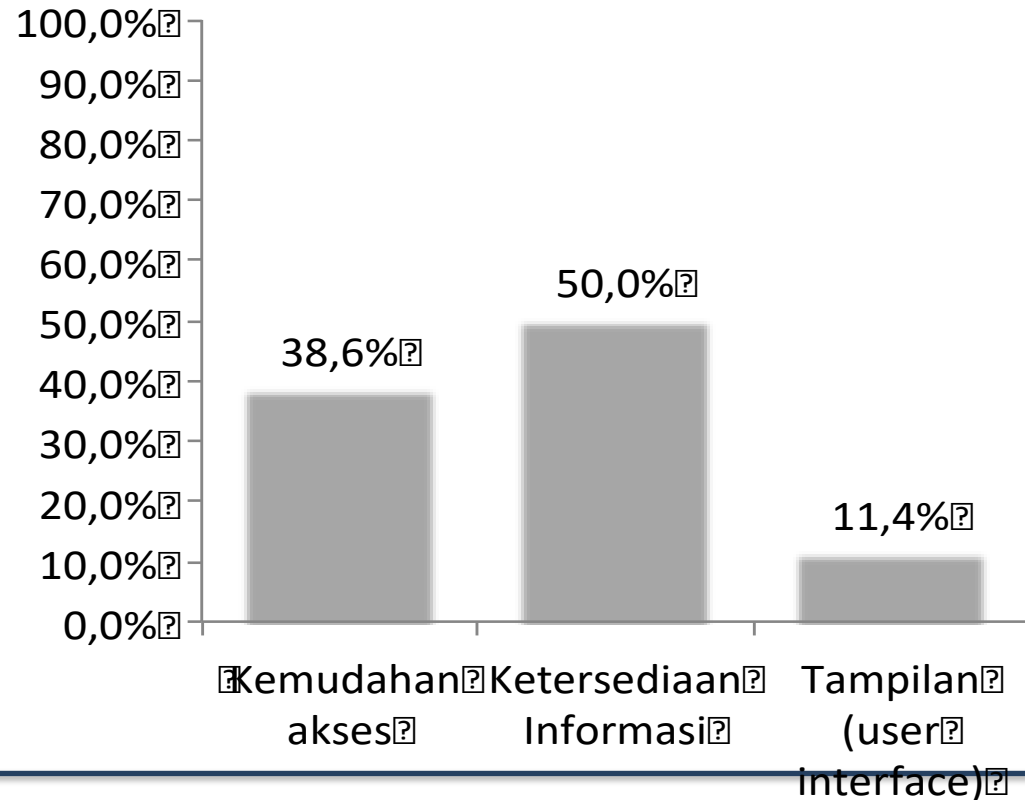
ANALISA

- Tabel di atas memperlihatkan skala penilaian yang menunjukkan belum terbukannya informasi mengenai (i) penyusunan prolegnas, (ii) penyiapan dan pembahasan RUU, (iii) pembahasan RUU APBN, (iv) pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan (v) pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
- Publik juga menilai rendah efektifitas mekanisme partisipasi publik, kunjungan kerja yang membuka akses bagi partisipasi publik, sosialisasi publik, dan keterbukaan parlemen untuk mendorong akuntabilitas DPR terkait dengan (i) penyusunan prolegnas, (ii) penyiapan dan pembahasan RUU, (iii) pembahasan RUU APBN, (iv) pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan (v) pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

REKOMENDASI PUBLIK

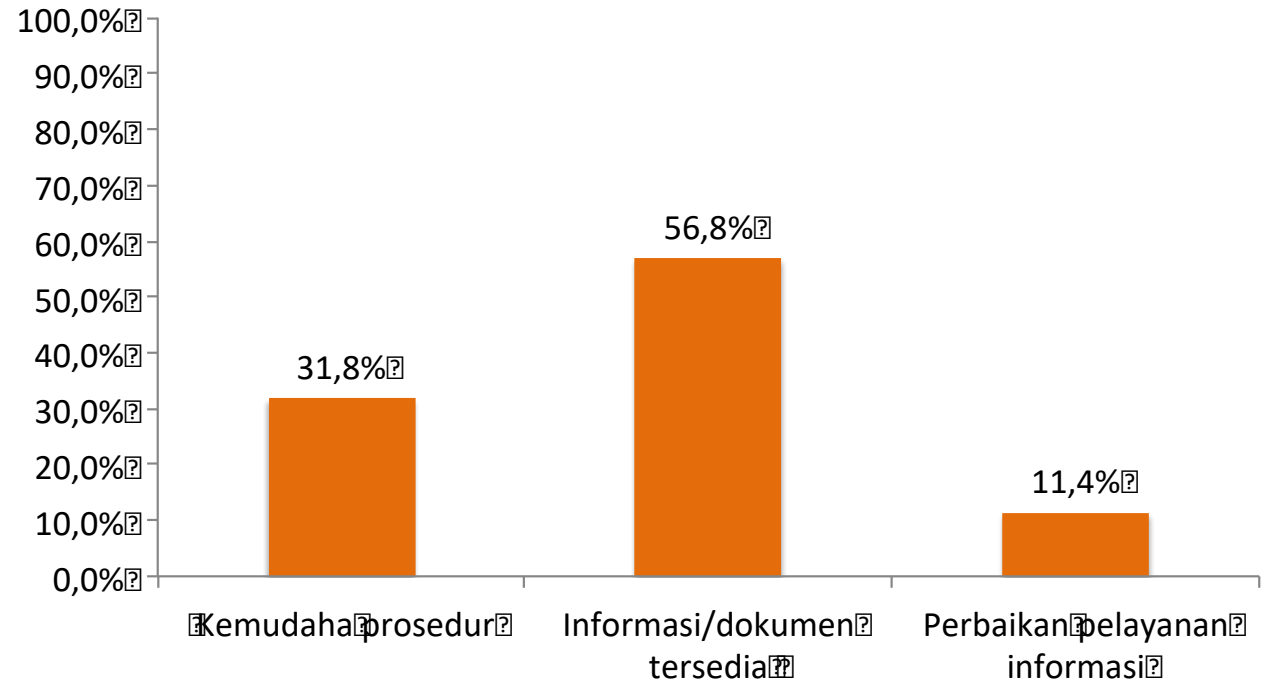
PENINGKATAN KEMUDAHAN MENGAKSES WEBSITE DPR RI

Apa yang harus ditingkatkan oleh DPR agar masyarakat mudah mengakses website DPR ? (n=100)



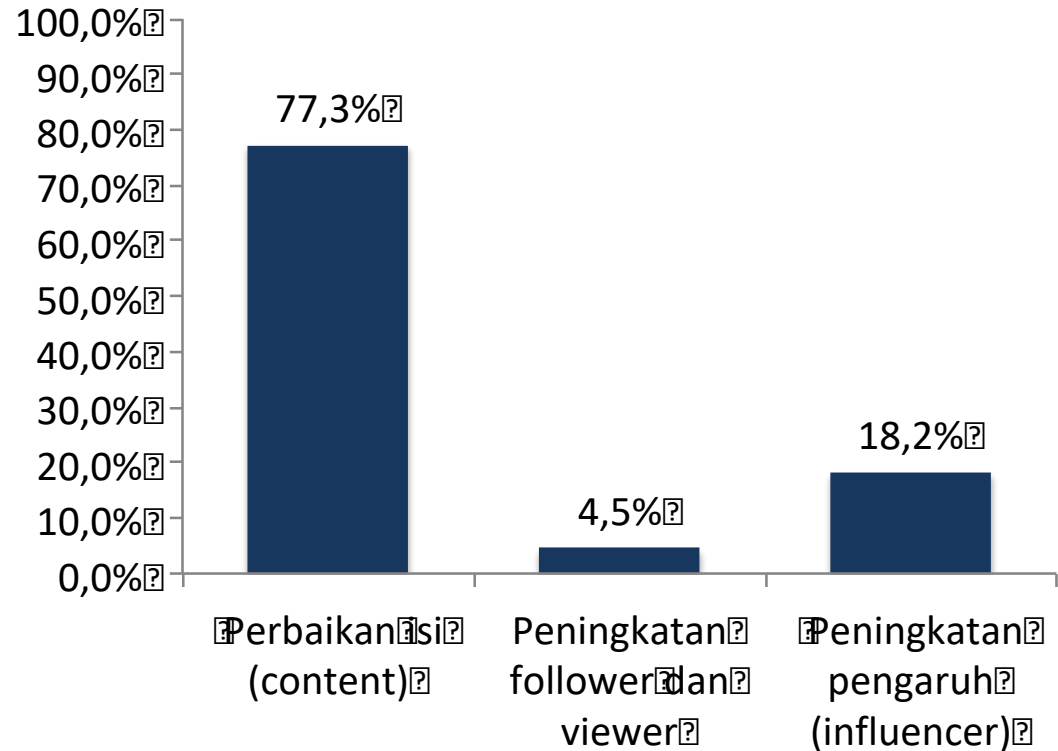
PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI

Apa yang harus ditingkatkan oleh DPR dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat ?
(n=100)



PENINGKATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Apa yang harus ditingkatkan oleh DPR dalam mengelola media sosial DPR? (n=100)



ANALISA

- Tiga grafik di atas memperlihatkan hasil survei mengenai rekomendasi publik bahwa (i) untuk memudahkan akses publik kepada website DPR RI, DPR harus memperbaiki dan memperhatikan ketersediaan dan up-dating informasi serta membangun infrastruktur yang memudahkan publik mengakses website darimanapun; (ii) demikian pula dalam pelayanan informasi, DPR RI harus memperbaiki dokumentasi dan ketersediaan informasi serta kemudahan prosedur pelayanan; dan (iii) dalam hal pengelolaan media sosial, hal yang harus diperbaiki adalah terkait dengan konten informasi.

INFORMASI YANG HARUS DIBUKA KE PUBLIK (SKALA NILAI 1-5)

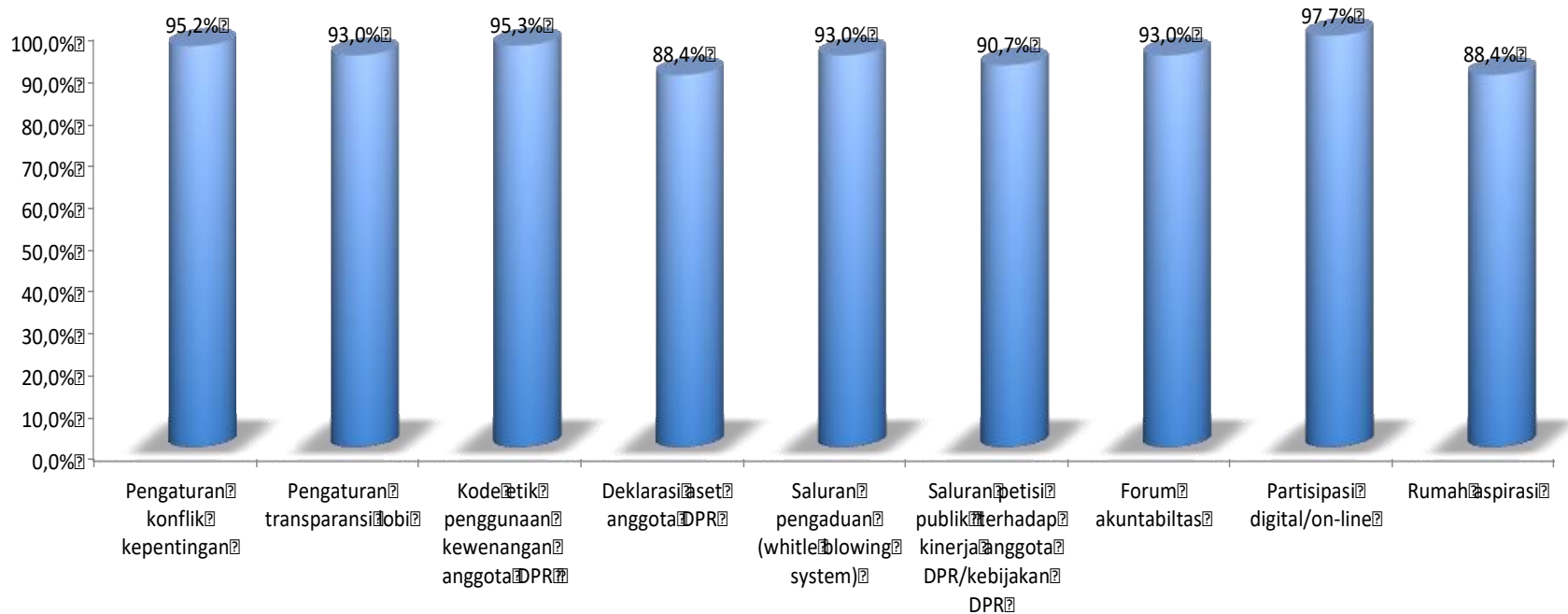
ISU	Skala Nilai
Laporan singkat (Lapsing)	3,73
Risalah (minute meeting)	3,66
Laporan hasil RDPU	4,11
Laporan sidang paripurna	4,18
Rekaman/Catatan hasil pengambilan suara dalam sidang Paripurna yang dibuka untuk publik	4,09
Daftar hadir sidang anggota DPR	5,00
Jadwal dan Agenda reses anggota DPR	4,32
Laporan kegiatan reses anggota DPR	4,30
Usulan/persiapan dan hasil prolegnas	4,23
Anggaran DPR	4,25
Asset DPR	4,32
Asset anggota DPR yang dibiayai negara	4,27
LHKPN Anggota DPR	5,00

ANALISA

- Tabel di atas memuat peniaian publik mengenai informasi yang harus disampaikan ke publik secara terbuka. Secara umum dari 13 informasi yang didaftar, hasil sruveri memperlihatkan bahwa informasi tersebut harus disampaikan kepada publik secara terbuka. Namun demikian, LHKPN anggota DPR dan Daftar hadir sidang anggota DPR mendapatkan penilaian tertinggi sebagai informasi yang harus disampaikan kepada publik secara terbuka.

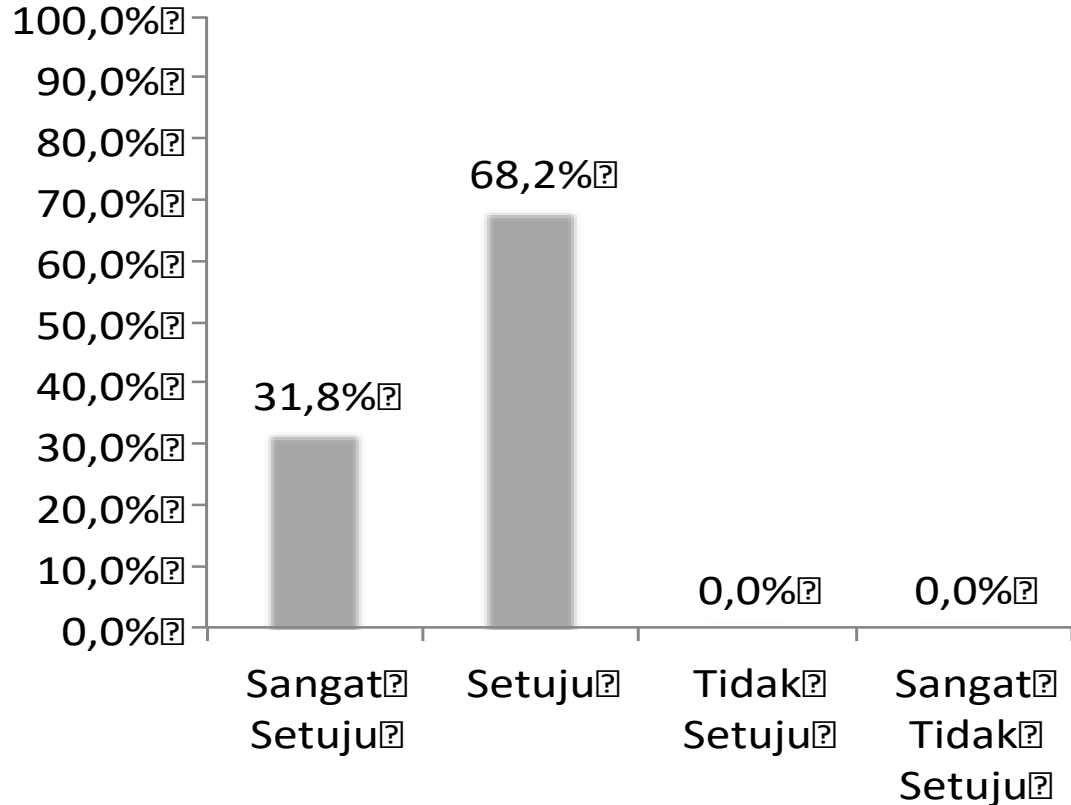
GAGASAN YANG PERLU DITERAPKAN DALAM RANGKA OPEN PARLIAMENT

Apakah gagasan berikut perlu diterapkan DPR dalam rangka mendorong *Open Parliament*? (n=100)



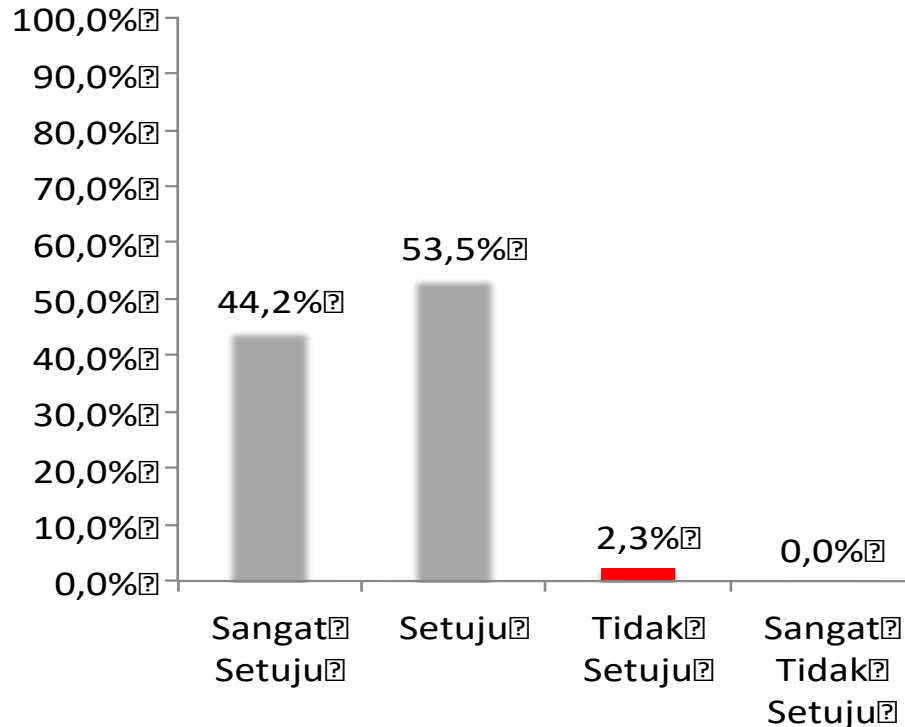
REVISI UNDANG-UNDANG MD3

Manurut Anda, apakah Undang-undang MD3 perlu direvisi dengan memasukkan aspek peraturan di atas ? (n=100)



KETERLIBATAN PUBLIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG MD3

Manurut Anda, Apakah
diperlukan ketelibatan
publik dalam melakukan
perbaikan UU MD3?
(n=100)



ANALISA

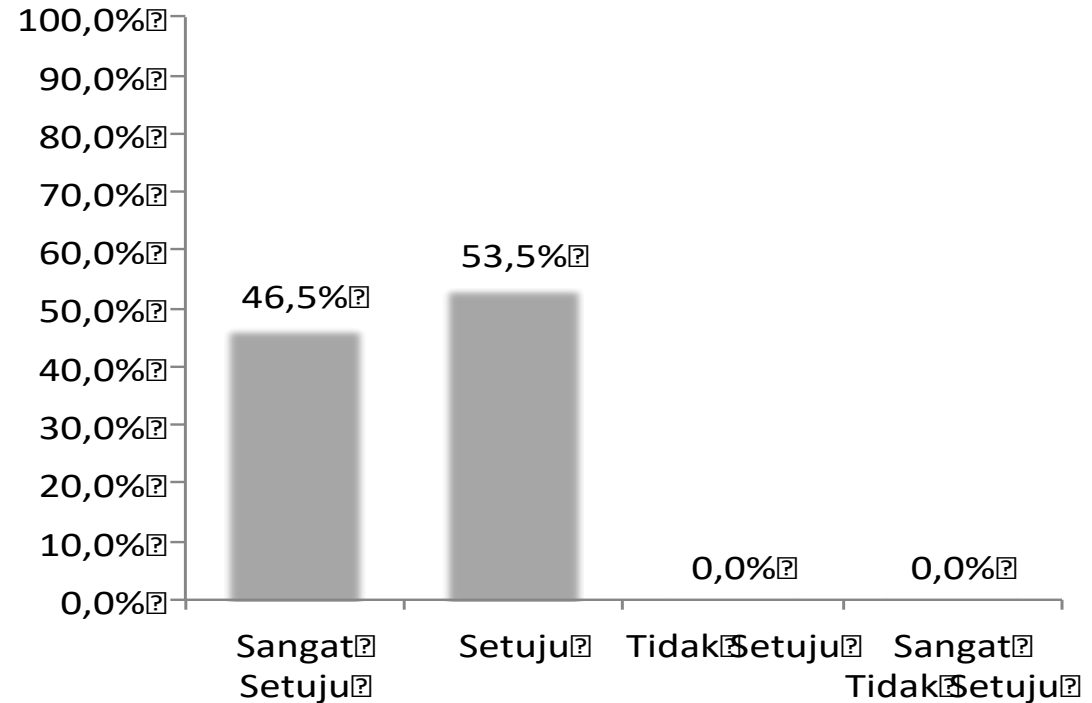
- Dalam rangka mendorong open parliament, publik menilai bahwa DPR harus menerapkan:
 - (i) pengaturan konflik kepentingan dalam rangka pencegahan korupsi,
 - (ii) pengaturan transparansi lobik,
 - (iii) kode etik penggunaan kewenangan anggota DPR RI,
 - (iv) deklarasi aset anggota DPR,
 - (v) saluran pengaduan (*whistle blowing system*),
 - (vi) Saluran petisi publik terhadap kinerja anggota DPR/kebijakan DPR
 - (vii) Forum akuntabilitas
 - (viii) Partisipasi digital/on-line
 - (ix) Rumah aspirasi

ANALISA

- Bahwa aturan-aturan tersebut di atas, menurut publik berdasarkan hasil survei, perlu dimasukkan dalam perundang-undangan melalui revisi Undang-undang MD3
- Dalam pelaksanaan revisi UU MD3, publik menilai bahwa keterlibatan publik menjadi suatu keharusan.

PUBLIKASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Manurut Anda, Apakah diperlukan RUU yang akan dibahas oleh anggota DPR, dipublikasikan lebih dahulu kepada publik, untuk mendapatkan masukan dari publik? (n=100)



ANALISA

- Dalam rangka mendorong keterbukaan parlemen dalam pembahasan RUU, maka RUU yang bersangkutan menurut penilaian publik harus lebih dahulu dipublikasikan untuk mendapatkan respon publik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan survei mengenai keterbukaan parlemen, dapat disimpulkan bahwa:

- Informasi deklarasi inisiatif parlemen yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, serta partisipasi publik yang merupakan hasil kolaborasi antara DPR RI dan CSO belum banyak diketahui oleh masyarakat dan bahkan sedikit publik yang mengetahui/membaca dokumen RAN Open Parliament DPR RI.
- Di lain sisi, pengetahuan publik mengenai jenis laporan dapat dinilai relatif rendah. Hal tersebut berbeda dengan tingkat pengetahuan publik mengenai kegiatan DPR yang dapat dinilai relatif cukup baik.

KESIMPULAN

- Tingkat akses publik kepada website DPR RI berdasarkan hasil survei dapat dinilai rendah, hal tersebut karena kemudahan akses terhadap website, informasi yang tersedia dan tampilan website yang dinilai negatif oleh responden. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan publik mengenai sarana informasi dalam bentuk ruang pelayanan informasi dan E-PPID, hasil survei memperlihatkan tingkat pengetahuan yang rendah.
- Informasi mengenai mekanisme publik juga menunjukkan belum tersosialisasi dengan baik ke publik yang berimplikasi kepada rendahnya tingkat keterlibatan publik melalui mekanisme partisipasi yang ada.

KESIMPULAN

- Masih sulitnya prosedur pelayanan informasi dan rendahnya ketersediaan informasi sesuai dengan kebutuhan publik menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi DPR. Selaian itu, publik menilai bahwa pengelolaan informasi di DPR saat ini belum efektif menjadikan DPR RI sebagai parlemen yang terbuka. Terlebih informasi yang disampaikan melalui media sosial/aplikasi juga dinilai kurang informatif.
- Dalam hal efektifitas mekanisme partisipasi publik, kunjungan kerja yang membuka akses bagi partisipasi publik, sosialisasi publik, dan keterbukaan parlemen untuk mendorong akuntabilitas DPR terkait dengan (i) penyusunan prolegnas, (ii) penyiapan dan pembahasan RUU, (iii) pembahasan RUU APBN, (iv) pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan (v) pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, publik memberikan penilaian yang relatif rendah (negatif)

KESIMPULAN

- Untuk mendorong keterbukaan parlemen melalui akses website, pelayanan informasi dan pengelolaan media sosial, publik menilai DPR RI harus memperhatikan dua hal (i) kemudahan akses/prosedur pelayanan dan (ii) ketersediaan informasi/perbaikan konten.
- Untuk mendorong keterbukaan parlemen, publik merekomendasikan bahwa informasi tentang (1) lapsing, (2) risalah, (3) laporan hasil RDPU, (4) laporan sidang paripurna, (5) rekaman/catatan hasil voting dalam sidang paripurna, (6) daftar hadir sidang, (7) jadwal dan agenda reses, (8) laporan kegiatan reses, (9) usulan/persiapan prolegnas, (10) anggaran DPR, (11) asset DPR, (12) Asset anggota DPR yang dibiayai negara, dan (13) LHKPN anggota DPR harus dipublikasikan.

KESIMPULAN

- Dalam rangka mendorong open parliament DPR RI yang transparan dan akuntabel, maka perlu diatur: pengaturan konflik kepentingan dalam rangka pencegahan korupsi, pengaturan transparansi lobik, kode etik penggunaan kewenangan anggota DPR RI, deklarasi aset anggota DPR, saluran pengaduan (*whistle blowing system*), Saluran petisi publik terhadap kinerja anggota DPR/kebijakan DPR Forum akuntabilitas Partisipasi digital/on-line, rumah aspirasi, dalam perundang-undangan melalui revisi UU MD3 yang melibatkan publik.
- Selain itu, dalam rangka mendorong open parliament DPR RI yang transparan dan akuntabel, maka setiap RUU yang akan dibahas perlu terlebih dahulu dipublikasikan untuk mendapatkan respon publik.